

LAKIP 2012



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
TAHUN 2012



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
MARET, 2013

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2012 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurang-berhasilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2012.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Ditjen Perhubungan Udara mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### a. Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien yang didukung oleh SDM yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis

### b. Sasaran

Dalam Perubahan Rencana Strategik Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2010 – 2014 mempunyai 12 (dua belas) sasaran, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatnya **Keselamatan** jasa transportasi udara;
2. Meningkatnya **Keamanan** jasa transportasi udara;
3. Meningkatnya **Pelayanan** jasa transportasi udara;
4. Meningkatnya **Aksesibilitas** pelayanan jasa transportasi udara dan konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatnya **Kapasitas** sarana dan prasarana transportasi udara sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan (*sustainable growth*);
6. Meningkatnya pemenuhan **Standar Teknis** dan **Standar Operasional** sarana dan prasarana transportasi udara;
7. Peningkatan **Kualitas SDM**;
8. Melanjutkan **Restrukturisasi Kelembagaan**;
9. Melanjutkan reformasi **Regulasi**;
10. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan **Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN** Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;



11. Meningkatkan pengembangan **Teknologi** transportasi udara yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim;
12. Menurunnya dampak transportasi udara terhadap **Lingkungan** melalui pengurangan konsumsi energi tak terbarukan dan emisi gas buang.

Dari 12 (dua belas) sasaran yang ditargetkan dalam alur akuntabilitas Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2012, ada 9 (Sembilan) sasaran yang rata - rata nilai capaiannya diatas 100% dan 3 (tiga) sasaran sasaran memiliki rata-rata nilai capaian sasaran dibawah 100% yakni :

1. Sasaran IV : Meningkatnya **Aksesibilitas** Pelayanan jasa transportasi udara dan konektivitas antar wilayah dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 85,05 %. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator sasaran yang nilai capaiannya dibawah 100% sebagai berikut :
  - Indikator Jumlah rute pelayanan perintis dengan kegiatan Pelayanan Angkutan Udara Perintis bertujuan untuk membuka aksesibilitas daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, terutama pada daerah-daerah yang tidak memiliki moda transportasi yang lain dengan jumlah rute pelayanan perintis ditargetkan sebanyak 132 rute angkutan udara perintis dan dapat direalisasikan sebanyak 130 rute atau sebesar 98,48% dikarenakan 2 (dua) rute tidak terealisasi yakni :
    - 1) Rute Namlea - Sanana tidak dapat direalisasikan karena Bandar udara Emalamo Sanana ditutup oleh warga akibat adanya perebutan lahan Bandar Udara.
    - 2) Bandara Bontang adalah bandara khusus tidak bisa di terbangi secara umum.
  - Dengan terbukanya aksesibilitas daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, terutama pada daerah-daerah yang tidak memiliki moda transportasi yang lain maka peningkatan permintaan terhadap jasa angkutan udara meningkat, sehingga jumlah penumpang perintis yang diangkut ditargetkan 274.456 orang namun realisasinya hanya mencapai 159.792 orang atau 58,22 %.
  - Dengan meningkatnya permintaan terhadap jasa angkutan udara, maka jumlah kota/daerah yang terhubung ditetapkan sebanyak 129 kota/kabupaten dan realisasi mencapai 127 kota/kabupaten dengan prosentase capaian 98,45 %. Kota yang yang tidak dapat terhubung adalah kota Sanana dan kota Bontang.



2. Sasaran VIII : Melanjutkan **Restrukturisasi Kelembagaan** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 90 % dikarenakan indikator sasarannya yaitu Jumlah kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan/atau Pemerintah Daerah di bidang Transportasi Udara hanya tercapai 9 kerjasama atau 90 % dari target sebesar 10 kerjasama.
  
3. Sasaran XII: Menurunnya dampak transportasi udara terhadap **Lingkungan** melalui pengurangan konsumsi energi tak terbarukan dan emisi gas buang dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 92,40 %. Hal ini dikarenakan terdapat indikator sasaran yang nilai capaiannya dibawah 100% sebagai berikut:
  - Jumlah konsumsi energi dari sumber tak terbarukan untuk transportasi udara terealisasi hanya 97,80 % atau 3.758.484 kilo liter/tahun dari target sebesar 3.751.009 kilo liter/tahun
  - Penurunan emisi gas buang CO2 dengan kegiatan peremajaan armada angkutan udara dengan capaian sebesar 85 % atau 56.331,33 Juta ton CO2 dari target sebesar 66.272,15 Juta ton CO2.

Sampai dengan akhir Desember 2012 **permasalahan** yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Tidak sinkronnya antara dokumen perencanaan (RPJM, Rencana Strategik), dengan rencana kinerja tahunan.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di UPT/Satker khususnya yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga menyebabkan terlambatnya proses pelelangan pekerjaan.
- c. Terlambatnya proses persetujuan pencairan tanda bintang pada kegiatan tertentu.
- d. Ketidakpastian terhadap penghematan/pemotongan anggaran serta penambahan anggaran dengan indikator pada umumnya DIPA APBN-P terbit di akhir tahun anggaran
- e. Kendala cuaca ekstrim dalam penyelesaian kegiatan.
- f. Hambatan keamanan di dalam penyelesaian kegiatan pada UPT/Satker tertentu.
- g. Masalah pembebasan lahan oleh Pemda mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.
- h. Terbatasnya fasilitas sarana penunjang pelaporan pelaksanaan kegiatan DIPA 2012 sehubungan dengan sistem e-monitoring berbasis internet.



**Langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh antara lain :**

- a. Diperlukan kebijakan untuk menerapkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek secara konsisten, meskipun tidak menutup kemungkinan dengan adanya perubahan terhadap lingkungan strategis.
- b. Perlunya perencanaan yang lebih matang dalam menyusun rencana anggaran, untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang akan terjadi.
- c. Perlunya koordinasi dengan auditor (BPKP, Itjen dll) agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang peraturan pengadaan barang dan jasa.
- d. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh ijin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- e. Perlu antisipasi terhadap hambatan yang biasa ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan baik faktor alam atau curah hujan atau bandara yang belum siap dioperasikan untuk angkutan udara perintis, misalnya dengan lelang tidak mengikat.

